

Evaluasi Efektivitas Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Panyaungan Kecamatan Cihara

Wandi S. Assayid¹, Ahmad Hapid TA², Muhammad Aldi Lubis³, Agus Sutisna⁴, Sanen A⁵, Anggie Fauzan Aziz⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Setia Budhi Rangkasbitung

Email Korespondensi: wandi@usbr.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis implementasi program, dampak yang dihasilkan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan yang diterapkan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial. Namun, masih terdapat beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, keterbatasan anggaran, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam program yang dijalankan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih adaptif dan berbasis partisipasi masyarakat agar kebijakan pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan, Efektivitas, Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara.

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of poverty alleviation policies in Panyaungan Village, Cihara District. The evaluation is conducted by analyzing program implementation, the impacts generated, and the challenges faced in efforts to reduce poverty rates in the region. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The results show that the implemented poverty alleviation policies have benefited the community, particularly by improving access to education, healthcare, and social assistance services. However, several challenges remain, such as program misalignment with local needs, budget constraints, and a lack of active community participation in the programs. Therefore, more adaptive and community-based participatory strategies are needed to ensure that poverty alleviation policies are more effective and sustainable.

Keywords: Policy Evaluation, Poverty Alleviation, Effectiveness, Panyaungan Village, Cihara District

Article History :

Received 27-10-2024; Revised 19-11-2024; Accepted 28-12-2024

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengentaskan kemiskinan, baik melalui program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur desa. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks implementasi di tingkat lokal. Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, merupakan salah satu desa yang masih menghadapi tantangan kemiskinan meskipun telah mendapatkan berbagai program pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan mampu memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa. Kemiskinan di pedesaan sering kali berkaitan dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta peluang ekonomi yang terbatas. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 9,36%, dengan sebagian besar masyarakat miskin berada di daerah perdesaan (BPS, 2023). Program pengentasan kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan

Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Dana Desa, telah diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih menjadi perdebatan karena berbagai kendala dalam pelaksanaannya (Suharto, 2021).

Desa Panyaungan merupakan salah satu desa di Kecamatan Cihara yang masih menghadapi tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Meskipun telah mendapatkan berbagai program bantuan, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya partisipasi masyarakat, serta ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal menjadi faktor penghambat keberhasilan kebijakan pengentasan kemiskinan. Sebagaimana dikemukakan oleh Chambers (1983), kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan ekonomi, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan. Evaluasi ini penting untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah diterapkan mampu mengurangi angka kemiskinan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program-program tersebut.

KAJIAN TEORETIK

1. Konsep Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Todaro dan Smith (2020), kemiskinan dapat dikategorikan menjadi kemiskinan absolut, yang mengacu pada ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, dan kemiskinan relatif, yang membandingkan kesejahteraan individu dengan standar hidup masyarakat di sekitarnya. Sementara itu, Sen (1999) berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi tetapi juga dari keterbatasan kapabilitas individu dalam mengakses sumber daya dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

2. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kebijakan pengentasan kemiskinan bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin melalui berbagai intervensi, baik bersifat langsung (seperti bantuan sosial) maupun tidak langsung (seperti pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur). Menurut Suharto (2021), kebijakan pengentasan kemiskinan dapat diklasifikasikan menjadi tiga strategi utama, yaitu:

1. Pendekatan Kesejahteraan Sosial – Memberikan bantuan sosial langsung kepada masyarakat miskin, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
2. Pendekatan Pemberdayaan – Meningkatkan kapasitas masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan penguatan kelembagaan ekonomi lokal.
3. Pendekatan Pembangunan Berbasis Komunitas – Mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan implementasi program, seperti Dana Desa.
4. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh faktor implementasi, koordinasi antar-stakeholder, serta keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan program (Ranis, Stewart, & Ramirez, 2000).

3. Evaluasi Efektivitas Kebijakan

Evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Dunn (2018), efektivitas kebijakan dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:

1. Output – Sejauh mana kebijakan menghasilkan program atau layanan yang sesuai dengan rencana awal.
2. Outcome – Dampak kebijakan terhadap kelompok sasaran, seperti peningkatan pendapatan masyarakat miskin atau akses terhadap layanan dasar.
3. Efisiensi – Kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh.
4. Keberlanjutan – Kemampuan kebijakan untuk tetap berjalan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan pada bantuan eksternal.

Dalam konteks pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan, pendekatan evaluasi ini penting untuk menilai apakah program yang telah diterapkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat atau masih terdapat kendala dalam implementasinya.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan dan analisis data kualitatif,

sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan, dampak yang ditimbulkan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya (Creswell, 2014).

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten, yang merupakan salah satu daerah yang menerima program pengentasan kemiskinan. Subjek penelitian meliputi:

- Aparat desa yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan.
- Masyarakat penerima manfaat dari program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
- Tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, seperti LSM atau organisasi yang terlibat dalam program sosial di desa tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara dilakukan dengan aparat desa, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang implementasi program, dampak kebijakan, serta kendala yang dihadapi. Teknik wawancara semi-terstruktur digunakan agar memungkinkan eksplorasi yang lebih fleksibel (Patton, 2002).

2. Observasi Lapangan

Observasi dilakukan untuk melihat langsung kondisi sosial-ekonomi masyarakat, infrastruktur pendukung program, serta partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan. Observasi ini bertujuan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder dari laporan kebijakan pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), peraturan daerah, serta literatur terkait kebijakan pengentasan kemiskinan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), yang terdiri dari beberapa tahap:

1. Pengumpulan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Koding dan kategorisasi data berdasarkan tema-tema utama, seperti implementasi kebijakan, efektivitas program, dan hambatan yang dihadapi.
3. Interpretasi hasil analisis untuk memahami efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan serta implikasinya bagi masyarakat di Desa Panyaungan.

5. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode (Denzin, 1978), yaitu:

- Triangulasi sumber dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.
- Triangulasi metode dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen guna mendapatkan hasil yang lebih valid dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Desa Panyaungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan telah diterapkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta program Dana Desa yang difokuskan pada pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa bekerja sama dengan dinas sosial dan instansi terkait untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat miskin. Namun, efektivitas implementasi program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya sosialisasi, serta masih adanya ketidaktepatan sasaran penerima manfaat.

Menurut Suharto (2021), keberhasilan program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dana, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme distribusi serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan implementasi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang merasa tidak mendapatkan manfaat maksimal karena kurangnya transparansi dalam penentuan penerima bantuan.

2. Dampak Kebijakan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berikut:

- Ekonomi: Program bantuan sosial seperti PKH dan BPNT telah membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi belum signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi. Menurut Todaro dan Smith (2020), program bantuan yang bersifat konsumtif

cenderung hanya memberikan efek jangka pendek dan tidak berkelanjutan. Beberapa warga yang mendapatkan bantuan modal usaha melalui program Dana Desa mengaku mengalami peningkatan pendapatan, tetapi jumlahnya masih terbatas.

- Pendidikan: Bantuan pendidikan melalui PKH telah meningkatkan akses anak-anak dari keluarga miskin ke sekolah. Namun, tantangan seperti biaya tambahan untuk transportasi dan perlengkapan sekolah masih menjadi kendala bagi sebagian keluarga penerima manfaat. Sen (1999) menyatakan bahwa pendidikan adalah elemen penting dalam pembangunan manusia, dan akses yang terbatas dapat memperpanjang siklus kemiskinan antargenerasi.
- Kesehatan: Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin (BPJS Kesehatan PBI) telah meningkatkan akses layanan kesehatan. Namun, masih ditemukan kendala dalam kualitas layanan kesehatan, seperti keterbatasan fasilitas dan tenaga medis di desa. Menurut Chambers (1983), kemiskinan multidimensional mencakup keterbatasan akses terhadap layanan dasar, yang dapat menghambat upaya peningkatan kesejahteraan.

3. Kendala dalam Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian juga mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam implementasi kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan, yaitu:

- Ketidaktepatan Sasaran: Beberapa warga mengeluhkan bahwa masih ada penerima manfaat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria kemiskinan, sementara mereka yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan. Hal ini selaras dengan temuan Ranis, Stewart, & Ramirez (2000) yang menyatakan bahwa kelemahan dalam pendataan dapat menghambat efektivitas kebijakan sosial.
- Kurangnya Partisipasi Masyarakat: Program pemberdayaan ekonomi yang didanai melalui Dana Desa masih belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan. Menurut Suharto (2021), program berbasis komunitas akan lebih efektif jika masyarakat terlibat aktif dalam prosesnya.
- Keterbatasan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Beberapa daerah di Desa Panyaungan masih memiliki akses yang terbatas terhadap infrastruktur dasar, seperti jalan dan listrik, yang menghambat pengembangan ekonomi masyarakat. Sesuai dengan teori pembangunan dari Todaro dan Smith (2020), infrastruktur yang memadai merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

4. Implikasi Temuan

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan telah memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam implementasinya. Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan, memperkuat program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, serta memastikan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program. Selain itu, evaluasi berkala perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan, Kecamatan Cihara, telah diterapkan melalui berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Dana Desa. Program-program ini memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, terutama dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, akses pendidikan, dan layanan kesehatan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi beberapa tantangan utama, yaitu ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan, serta keterbatasan infrastruktur yang menghambat pengembangan ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan menunjukkan hasil yang bermanfaat tetapi belum sepenuhnya optimal. Program bantuan sosial mampu memberikan dampak jangka pendek dalam meringankan beban masyarakat miskin, tetapi belum cukup kuat untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan agar pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan:

1. Meningkatkan Akurasi Pendataan Penerima Manfaat Pemerintah desa perlu melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan secara berkala guna memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Penggunaan teknologi informasi dalam pendataan dapat membantu meningkatkan transparansi dan akurasi data.

2. Mendorong Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal Program pengentasan kemiskinan perlu diarahkan lebih pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan tangan. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan lembaga pelatihan, perguruan tinggi, atau LSM untuk memberikan pendampingan dan pelatihan keterampilan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program Agar program lebih tepat sasaran, masyarakat perlu dilibatkan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Dengan adanya musyawarah desa (musdes) yang lebih inklusif, pemerintah dapat memahami kebutuhan nyata masyarakat dan menyesuaikan program agar lebih efektif.
4. Memperbaiki Infrastruktur Pendukung Perekonomian Keterbatasan infrastruktur, seperti akses jalan, listrik, dan jaringan internet, menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
5. Melakukan Evaluasi Berkala terhadap Program yang Telah Dijalankan Evaluasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala dan berbasis data untuk mengukur efektivitas program serta melakukan perbaikan jika ditemukan kendala dalam implementasi. Pemerintah desa dapat bekerja sama dengan peneliti atau akademisi untuk melakukan studi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan kebijakan pengentasan kemiskinan di Desa Panyaungan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

REFERENSI

- Bappenas. (2021). Strategi Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Chambers, R. (1983). *Rural Development: Putting the Last First*. Longman.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- Denzin, N. K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Routledge.
- Kementerian Sosial RI. (2022). *Evaluasi Program Bantuan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan*. Jakarta: Kemensos.
- Kuncoro, M. (2018). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), 139-191.
- Maxwell, J. A. (2013). *Qualitative Research Design: An Interactive Approach*. Sage Publications.
- Mubyarto. (2000). *Ekonomi Kerakyatan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. BPFE UGM.
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Sage Publications.
- Ranis, G., Stewart, F., & Ramirez, A. (2000). Economic Growth and Human Development. *World Development*, 28(2), 197-219.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Suharto, E. (2021). *Kebijakan Sosial: Transformasi Ide dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development*. Pearson.
- UNDP. (2021). *Human Development Report 2021/2022: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2022). *Poverty and Shared Prosperity 2022: Correcting Course*. Washington, DC: World Bank.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sage Publications.
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2015). Growth, Poverty, and Inequality in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Economies*, 32(3), 322-341.